

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan hidup suatu negara. Menciptakan pembangunan yang berkesinambungan adalah hal penting yang harus dilakukan oleh sebuah Negara dengan tujuan untuk menciptakan kondisi bagi masyarakat untuk dapat menikmati lingkungan yang menunjang bagi hidup sehat, umur panjang dan menjalankan kehidupan yang produktif.

Pembangunan Sumber Daya Manusia mencakup peningkatan kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan. Kapasitas dasar menurut Todaro (2003) yang sekaligus merupakan tiga nilai pokok keberhasilan pembangunan ekonomi adalah kecukupan (*sustenance*), jati diri (*selfsteem*), serta kebebasan (*freedom*). Kecukupan dalam hal ini merupakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keamanan.

Fungsi dasar dari kegiatan ekonomi pada dasarnya adalah untuk menyediakan sebanyak mungkin kebutuhan dasar masyarakat, atas dasar itulah syarat penentu keberhasilan ekonomi adalah membaiknya kualitas kehidupan seluruh lapisan masyarakat (Charisma Kuriata Ginting, 2008). Pemerintah pusat sebagai pemangku kepemimpinan Negara Indonesia tentunya harus bertanggung jawab atas hal tersebut, di mana pembangunan merupakan pemicu

dan pemacudari pertumbuhan ekonomi diseluruh wilayah, namun tentunya juga jika dilaksanakan secara adil dan merata di semua wilayah di Indonesia.

Menurut Riza Danamik (2014) perekonomian Indonesia tahun 2014 akan dihadapkan dengan kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan, bahkan lebih memprihatinkan dari krisis yang terjadi pada tahun 1998 lalu. Karena Indonesia masih mempunyai utang yang pada Oktober 2013 lalu tercatat masih Rp 915,175 triliun, dan posisi utang luar negeri pemerintah mencapai USD 123,212, yang seluruhnya harus dibayar dengan dolar. Di tengah-tengah usaha Indonesia membayar cicilan utang dan bunganya, nilai tukar dolar AS terhadap rupiah kembali meroket, bahkan hingga menyentuh angka Rp 12.000. Keadaan itu membuat utang Indonesia membengkak menjadi sekitar Rp.1.478,544 triliun utang luar negeri dan Rp.915,175 triliun utang dalam negeri. Total utang Indonesia mencapai Rp.2.393,719 triliun.

Selain itu Indonesia juga menghadapi masalah lainnya yaitu rendahnya tingkat pembangunan manusia, hal ini merupakan masalah yang sangat penting dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang adil dan merata bagi semua masyarakat Indonesia. Rendahnya pembangunan manusia dapat dilihat dari *Human Development Index* (HDI) atau yang lebih dikenal sebagai Indeks Pembangunan Manusia yang dikeluarkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP). Pencapaian pembangunan manusia dalam suatu Negara mencakup tiga dimensi pembangunan manusia yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak dapat digambarkan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu negara dimana pembangunan suatu negara tidak bisa dikatakan berhasil apabila hanya melihat dari besarnya pendapatan

domestik bruto saja tanpa meningkatkan pembangunan manusianya. Sering kali tingginya pendapatan domestik bruto suatu negara tidak diimbangi dengan tingkat pembangunan manusia yang sejalan pula. Hal ini pada akhirnya dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat yang diakibatkan oleh kesenjangan tingkat ekonomi masing-masing kelompok masyarakat.

Posisi IPM Indonesia berada pada urutan ke 5 di antara anggota ASEAN lainnya, IPM Indonesia pada tahun 2013 yaitu sebesar 0.684 dan berada di peringkat 108 dari 187 negara dari tahun sebelumnya. Ada beberapa negara anggota ASEAN yang menempati peringkat lebih rendah dari negara Indonesia, yaitu negara Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos dan Myanmar. Negara Indonesia terdapat pergerakan ke atas yang tidak jauh dari tahun sebelumnya yaitu 0.681. perkembangan ini merupakan perkembangan yang positif, karena dari sisi kesehatan sudah ada system Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dari pemerintah, serta perbaikan lainnya dalam hal pendapatan dan pendidikan.

Terdapat tiga peran utama yang harus dapat dilaksanakan dengan baik dalam perekonomian oleh pemerintah Indonesia, menurut Guritno(2001) yaitu :

a. Peran Stabilisasi

Pada pemerintahan modern saat ini, hampir semua negara menyerahkan roda perekonomiannya kepada pihak swasta/perusahaan. Pemerintah lebih berperan sebagai stabilisator, untuk menjaga agar perekonomian berjalan normal. Menjaga agar permasalahan yang terjadi pada satu sektor perekonomian tidak merembet ke sektor lain.

b. Peran Distribusi

Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar alokasi sumber daya ekonomi dilaksanakan secara efisien agar kekayaan suatu negara dapat terdistribusi secara baik dalam masyarakat.

c. Peran Alokasi

Pada dasarnya sumber daya yang dimiliki suatu negara adalah terbatas. Pemerintah harus menentukan seberapa besar dari sumber daya yang dimilikikan dipergunakan untuk memproduksi barang-barang publik, dan seberapa besar akan digunakan untuk memproduksi barang-barang individu. Pemerintah harus menentukan dari barang-barang publik yang diperlukan warganya, seberapa besar yang harus disediakan oleh pemerintah, dan seberapa besar yang dapat disediakan oleh rumah tangga perusahaan.

Seiring dengan semakin meningkatnya kegiatan pemerintah dalam rangka menjalankan ke-tiga peran yang ada, maka tentunya diperlukan pula dana yang besar sebagai bentuk pengeluaran segala kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan ke-tiga peran tersebut. Pengeluaran pemerintah ini merupakan konsekuensi dari berbagai kebijakan yang diambil dan diterapkan melalui ke-tigaperan tersebut.

Pengeluaran pemerintah dapat digunakan sebagai cerminan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu wilayah. Kebijakan pemerintah dalam tiap pembelian barang dan jasa guna pelaksanaan suatu program mencerminkan besarnya biaya yang akan dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan program tersebut. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai sektor-sektor publik yang penting, diantara kesemua sektor publik saat ini yang menjadi prioritas pemerintah dalam mencapai pembangunan kualitas sumber daya

manusia dalam kaitannya yang tercermin dari indeks pembangunan manusia adalah investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan diharapkan Investasi pada sektor ini akan berpengaruh pada peningkatan kualitas SDM dan mengurangi kemiskinan.

Dalam melakukan kegiatan sehari-hari manusia tidak akan terlepas dari kegiatan konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan membelanjakan pendapatan untuk berbagai macam barang dan jasa guna memenuhi segala kebutuhan manusia, baik itu untuk kebutuhan jasmani maupun rohani seperti makan, minum, pendidikan, kesehatan, hiburan dan kebutuhan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi merupakan salah satu penggerak dalam kegiatan perekonomian.

Pengeluaran konsumsi juga merupakan salah satu indikator untuk menentukan tingkat kesejahteraan ekonomi suatu penduduk/negara, karena pengeluaran konsumsi rumah tangga berhubungan erat dengan pendapatan nasional. Keynes dalam Soediyono (1992) berpendapat bahwa pendapatan nasional menentukan besar kecilnya pengeluaran konsumsi rumah tangga, yang berarti bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga akan naik secara proporsional bila terjadi peningkatan terhadap pendapatan nasional.

Konsumsi masyarakat menurut Dumairy (1996) dapat dikelompokkan ke dalam konsumsi makanan dan bukan makanan. Konsumsi makanan merupakan pembelanjaan masyarakat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan, yang terdiri dari padi-padian, umbi-umbian, sayur-sayuran, lauk pauk, buah-buahan, makanan dan minuman jadi, tembakau serta sirih. Sementara itu konsumsi bukan makanan adalah pembelanjaan untuk memenuhi kebutuhan selain pangan. Alokasi pengeluaran bukan makanan

terdiri dari perumahan dan bahan bakar, aneka barang dan jasa, biaya pendidikan, biaya kesehatan, pakaian, alas kaki, barang-barang tahan lama, pajak dan premi asuransi, serta keperluan pesta dan upacara.

Berikut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan persentase pengeluaran konsumsi rata-rata perkapita menurut kelompok barang tahun 2004-2013. Dalam kurun waktu sepuluh tahun pengeluaran konsumsi masyarakat Indonesia mengalami pergeseran, yaitu yang awalnya lebih banyak pengeluaran konsumsi makanan, kini beralih ke pengeluaran bukan makanan yang semakin meningkat.

Tabel 1.1
Persentase Pengeluaran Konsumsi Rata-rata per Kapita Sebulan
Menurut Kelompok Barang di Indonesia Tahun 2004-2013

Tahun	Kelompok Barang	
	Makanan (%)	Bukan Makanan (%)
2004	54,59	45,41
2005	51,37	48,63
2006	53,01	46,99
2007	49,24	50,76
2008	50,17	49,83
2009	50,62	49,38
2010	51,43	48,57
2011	48,95	51,05
2012	49,39	50,61
2013	48,92	51,08

Sumber : www.bps.go.id

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2004 persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk makanan mencapai 54,59% dan sisanya sekitar 45,42% dialokasikan untuk bukan makanan. Pada tahun berikutnya pengeluaran konsumsi mengalami fluktuasi baik pada pengeluaran makanan maupun bukan makanan. Meskipun demikian jika dilihat dari perkembangan dari tahun ke tahun pengeluaran konsumsi bukan makanan

mengalami kenaikan. Hal ini dipicu karena adanya kebutuhan masyarakat yang semakin beranekaragam, sehingga pola konsumsi masyarakat Indonesia mengalami pergeseran, yaitu yang awalnya lebih besar untuk makanan kini beralih ke pengeluaran non makanan. Dilihat dari sisi makro, peningkatan konsumsi merupakan hal positif karena mencerminkan daya beli yang semakin tinggi. Namun konsumsi yang tinggi ini juga merupakan suatu permasalahan, karena mencerminkan kecenderungan mengkonsumsi marginal (marginal propensity to consume) masyarakat yang tinggi dan hal ini dapat menimbulkan sifat konsumtif bagi masyarakat.

Tabel 1.2
Pendapatan Perkapita Negara-Negara ASEAN Tahun 2013 (US\$)

Negara	PendapatanPerkapita (US\$)
Singapur	57,238
Brunai Darussalam	47,200
Malaysia	14,603
Thailand	8,630
Philipina	4,725
Indonesia	4,380
Vietnam	3,123
Kamboja	2,805
Laos	2,435
Myanmar	1,900

Sumber: UNDP, 2013. *Human Development Report 2013/2014*

Berdasarkan Tabel 1.2, di mana posisi Pendapatan Perkapita Indonesia berada pada urutan ke 6 di antara anggota Negara ASEAN lainnya, Pendapatan perkapita Indonesia pada tahun 2013 yaitu sebesar 4.380 US\$. Hal ini sangat jauh dengan beberapa negara ASEAN lainnya yang terhitung berhasil menerjemahkan perolehan PDP/kapita ke dalam pembangunan manusia seperti Negara Philipina dengan tingkat perolehan PDB/kapita yang tidak sebesar

Indonesia namun mampu mencapai tingkat pembangunan manusia yang lebih tinggi dari Indonesia.

Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan membutuhkan manusia yang berkualitas sebagai modal dasar bagi pembangunan. Manusia dalam peranannya merupakan subjek dan objek pembangunan yang berarti manusia selain sebagai pelaku dari pembangunan juga merupakan sasaran pembangunan. Dalam hal ini dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendorong peran manusia dalam pembangunan. Oleh karenanya dibutuhkan investasi untuk dapat menciptakan pembentukan sumber daya manusia yang produktif.

Investasi pada modal manusia diharapkan akan berpengaruh positif terhadap kinerja perekonomian yang salah satunya dapat diamati dari aspek tingkat pendidikan, kesehatan dan tingkat kemiskinan. Investasi modal manusia ini yang mencakup pengembangan Sumber Daya Manusia membutuhkan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran dalam mendorong peningkatan kualitas SDM. Menurut Mankiw (2008), pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas modal manusia.

Dalam hal ini modal manusia dapat mengacu pada pendidikan. Pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar di suatu wilayah. Menurut Meier dan Rauch (dalam Aloysius Gunadi Brata, 2002) pendidikan, atau lebih luas lagi adalah modal manusia, dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan. Hal ini karena pendidikan pada dasarnya adalah bentuk dari tabungan, menyebabkan akumulasi modal manusia dan pertumbuhan output agregat jika modal manusia merupakan input dalam fungsi produksi agregat. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal yang

pokok untuk mencapai kehidupan yang layak. Pendidikan memiliki peran yang penting dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2006). Selain itu rumah tangga masyarakat memegang peranan penting dalam pembangunan manusia, di mana pengeluaran rumah tangga memiliki kontribusi langsung terhadap pembangunan manusia, seperti: makanan, kesehatan dan pendidikan. Pengeluaran rumah tangga ditentukan oleh pendapatan. Penduduk miskin akan lebih banyak atau bahkan seluruh pendapatannya digunakan untuk kebutuhan makanan, dibandingkan penduduk kaya. Akibatnya penduduk miskin tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak jika hanya mengandalkan pendapatannya. Di sinilah perlunya campur tangan pemerintah untuk membantu penduduk yang kurang mampu atau miskin (Charisma Kuriata Ginting, 2008).

Kemiskinan akan menghambat individu untuk mengonsumsi nutrisi bergizi, mendapatkan pendidikan yang layak serta menikmati lingkungan yang menunjang bagi hidup sehat. Dari sudut pandang ekonomi kesemuanya itu akan menghasilkan sumber daya manusia yang kurang berkualitas, atau dapat dikatakan memiliki tingkat produktivitas yang rendah. Hal ini juga berimbas pada terbatasnya upah/pendapatan yang dapat mereka peroleh. Sehingga dalam perkembangannya hal ini akan mempengaruhi tingkat pembangunan manusia di suatu daerah.

Posisi peringkat Indeks Pembangunan Manusia Indonesia merupakan akumulasi dari total angka Indeks Pembangunan Manusia pada level provinsi yang ada di Indonesia. Secara keseluruhan, Jawa Timur berada pada posisi ke

15 dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Angka IPM Propinsi Jawa Timur juga menunjukkan bahwa secara keseluruhan tingkat IPM Propinsi Jawa Timur berbanding lurus dengan tingkat IPM pada skala nasional. Jika dibandingkan dengan propinsi lainnya yang berada di pulau Jawa, maka Propinsi Jawa Timur masuk dalam peringkat terakhir dari lima propinsi yang ada di pulau Jawa.

Tabel 1.3
Perbandingan IPM per Propinsi di Pulau Jawa
(2010-2013)

Provinsi	2010	Rank	2011	Rank	2012	Rank	2013	Rank
DKI Jakarta	77.6	1	77.97	1	78.33	1	78.59	1
Jawa Barat	72.29	14	72.73	15	73.11	15	73.58	15
Jawa Tengah	72.49	17	72.94	14	73.36	14	74.05	14
Yogyakarta	75.77	2	76.32	2	76.75	4	77.37	4
Jawa Timur	71.62	22	72.18	22	72.83	19	73.54	18

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014

Jawa Timur mengalami pertumbuhan IPM secara bertahap dari tahun 2010 hingga tahun 2013 serta naik ke peringkat 18 dalam urutan IPM propinsi yang ada di Indonesia. Dalam sumbangsihnya terhadap PDB nasional, pulau Jawa merupakan penyumbang terbesar jika dibandingkan dengan pulau lainnya dengan perincian provinsi-provinsi di Jawa yang memberikan sumbangan terbesar adalah DKI Jakarta (16,8 persen), Jawa Timur (15,0 persen), Jawa Barat (13,9 persen), dan Jawa Tengah (8,6 persen) (BPS, 2014). Jika mengacu pada sumbangsih terhadap PDB nasional maka Jawa Timur tidak cukup baik dalam peringkat IPM nasional dengan masuk peringkat 18, karena Propinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah masuk peringkat 15 dan 14. Jadi masih diperlukan usaha yang lebih baik lagi bagi Propinsi Jawa Timur untuk dapat semakin meningkatkan IPM dalam peringkat nasional, dan hal ini membutuhkan kebijakan yang tepat dari pemerintah Propinsi Jawa Timur.

Selain itu kemiskinan merupakan salah satu masalah penting yang dihadapi pemerintah yang mempengaruhi pembangunan manusia di Jawa Timur. Tingkat kemiskinan yang tinggi membuat individu tidak mempunyai alokasi dana dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya salah satunya yang berhubungan dengan proses pembangunan manusia. Masalah kemiskinan merupakan hal penting yang perlu ditangani pemerintah daerah Jawa Timur. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan daerah-daerah di pulau Jawa lainnya. Menurut Tabel 1.5 jumlah penduduk miskin di Jawa Timur paling tinggi apabila dibandingkan dengan daerah di pulau Jawa lainnya yaitu mencapai 4.865,82ribu jiwa pada tahun 2013 dengan jumlah penduduk miskin rata-rata 4.865,82ribu jiwa.

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Miskin
(ribuan)

Provinsi	2011	2012	2013	Rata-rata
DKI Jakarta	363,42	366,80	375,70	368,64
Jawa Barat	4.648,63	4.421,50	4.382,65	4.382,65
Jawa Tengah	5.107,36	4.863,40	4.704,87	4.704,87
Yogyakarta	560,88	562,10	535,18	552,72
Jawa Timur	5.356,21	4.960,50	4.865,82	4.865,82
Banten	690,49	648,30	682,71	673,83

Sumber: BPS, Statistik Indonesia, 2014

Berdasarkan latar belakang diatas menarik untuk dibahas mengenai pembangunan manusia di Jawa Timur. Selain itu di dalam penelitian ini juga akan dilihat bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengaruh jumlah penduduk miskin serta pendapatan perkapita terhadap pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur pada periode tahun 2009-2013. Sehingga peneliti mengambil judul penelitiannya dengan judul **“ANALISIS PENGARUH TINGKAT KEMISKINAN, KONSUMSI NON MAKANAN DAN**

PENDAPATAN PERKAPITA TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2009-2013.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas. Muncul pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur?
2. Bagaimana pengaruh konsumsi non makanan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur?
3. Bagaimana pengaruh pendapatan perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk miskin terhadap pembangunan manusia di Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui pengaruh konsumsi non makanan terhadap pembangunan manusia di Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan perkapita terhadap pembangunan manusia di Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan rujukan referensi yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya, terutama penelitian yang berhubungan dengan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia khususnya bagi pemerintah Jawa Timur. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi inspirasi

bagi para peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan menggunakan objek penelitian dan variabel yang berbeda.

1.4.2 Manfaat Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai kualitas Sumber Daya Manusia dengan mengukur Indeks Pembangunan Manusia yang nantinya bias dijadikan indikator awal perekonomian semakin membaik di masa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan urutan penyajian dari masing-masing bab secara terperinci, singkat dan jelas serta diharapkan dapat mempermudah dalam memahami laporan penelitian. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan pendahuluan dari seluruh penulisan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang landasan teori dan penelitian terlebih dahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis yang merupakan jawaban sementara dari suatu yang diteliti.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang variable penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan tentang gambaran umum semua variabel, deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil pengolahan data.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang simpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penulis serta saran-saran yang dapat diberikan kepada perusahaan dan pihak-pihak lain yang membutuhkan.